

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 15 JUNI 2020 – 13 AGUSTUS 2020
(Masa Sidang Mulai Tanggal 15 Juni – 16 Juli 2020
dan Masa Reses Mulai Tanggal 17 Juli – 13 Agustus 2020)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

1. RUU Usul Inisiatif Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2020

Raker Baleg DPR RI dengan Pemerintah (Menkumham) dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 2 Juli 2020 telah memutuskan mengurangi 16 (enam belas) RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan mengganti RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa:

- a. Dari 16 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang dikurangi, terdapat 2 RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI Tahun 2020, yaitu:
 - 1) RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
 - 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

- b. Dari RUU yang diganti dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, RUU yang diganti oleh Pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Komisi I DPR RI yaitu: RUU tentang Keamanan Laut yang diganti dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

2. RUU Usul Inisiatif Prioritas Pemerintah Tahun 2020

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

- a. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi dan Asosiasi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU PDP, yaitu dengan:
 - 1) Agus Sudibyo
 - 2) Edmon Makarim
 - 3) Sinta Dewi Rosadi
 - 4) Nonot Harsono
 - 5) Sih Yuliana Wahyuningtyas
 - 6) Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
 - 7) iDea
 - 8) Asosiasi Fintech (Aftech) Indonesia
 - 9) US Asean Business Council
 - 10) Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi
 - 11) ATSI
 - 12) APJII
- b. Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Raker yang kedua dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) dalam rangka pembahasan RUU PDP pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

3. RUU Kumulatif Terbuka

- a. **RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*)**

Pada tanggal 13 Juli 2020, Komisi I DPR RI telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan pada tanggal 13 Juli 2020 dan telah melaporkannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 Juli 2020 dalam rangka Pembicaraan Tingkat II. Selanjutnya Rapat Paripurna telah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang.

b. RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*)

- 1) Sebagaimana keputusan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 30 April 2020 dan 11 Mei 2020 yang telah menugaskan Komisi I DPR RI dan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss bersama-sama dengan Pemerintah, dengan keanggotaan 30 orang, yang terdiri dari 15 orang Anggota Komisi I DPR RI dan 15 orang Anggota Komisi III DPR RI, Komisi I DPR RI telah menugaskan 15 orang Anggota Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tersebut bersama-sama dengan Komisi III DPR RI dan Pemerintah.
- 2) RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss telah selesai dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I dan telah disetujui pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 Juli 2020, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang.

c. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*)

Terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI merencanakan akan membahasnya pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 dengan terlebih dahulu melaksanakan RDPU dan RDP dengan Pakar/Akademisi dan Pejabat Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan.

II. FUNGSI ANGGARAN

Sesuai dengan penjadwalan Rapat dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi I DPR RI pada tanggal 18-25 Juni 2020 telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan RKA RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI Tahun Anggaran 2021.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

1. **Pertimbangan Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat**

Sebagaimana penugasan dari Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Mei dan 15 Juni 2020 yang telah menugaskan Komisi I DPR RI melaksanakan pemberian pertimbangan terhadap 32 (tiga puluh dua) Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat, maka Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 telah melaksanakan:

- a. Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat pada tanggal 16-18 Juni 2020 dalam rangka penyampaian visi misi Calon Dubes dan pendalaman (tanya jawab) secara tertutup (rahasia)
- b. Rapat Intern tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka pembahasan pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat
- c. Melaporkan hasil pembahasan Komisi I DPR RI dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat kepada Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan Komisi I DPR RI kepada Presiden secara rahasia.

2. **Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan isu-isu aktual terkait dengan bidang dan tugas Komisi I DPR RI yang waktunya bersamaan dengan pembahasan RKA RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI Tahun Anggaran 2021**

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan isu-isu aktual terkait dengan bidang dan tugas Komisi I DPR RI, yaitu:

- a. **Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan pada tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas isu aktual di bidang pertahanan, diantaranya mengenai:**
 - 1) Kesiapan Kemhan/TNI dalam menghadapi bentuk ancaman baru di Indonesia
 - 2) Perkembangan Prolegnas dan Penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang negara di Bidang Pertahanan
 - 3) Kesiapan TNI dalam pelibatan Pengimplementasian Tatanan Kehidupan Baru (*New Normal*)dalam Rapat bersifat tertutup.

- b. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 22 Juni 2020 dalam rangka membahas isu aktual di bidang komunikasi dan informatika, diantaranya mengenai:**
- 1) Kebijakan dan program strategis Kemkominfo terkait penerapan Era New Normal
 - 2) Evaluasi penggunaan aplikasi tracing, tracking dan fencing COVID-19
 - 3) Persiapan Kemkominfo terkait Pilkada Serentak Desember 2020
- dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas upaya dan dukungan yang telah dilakukan oleh Kemkominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers dalam upaya membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
 - 2) Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk mensosialisasikan Kebijakan Tatanan Kehidupan Baru (*New Normal*) sesuai tupoksinya, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dengan benar.
- c. Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu pada tanggal 22 Juni 2020 dalam rangka membahas isu aktual di bidang luar negeri, diantaranya mengenai:**
- 1) Kebijakan Polugri/ Diplomasi Indonesia dalam memastikan *Medical Equipment and Supplies*, serta akses terhadap Vaksin.
 - 2) Situasi terkini dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, diantaranya seperti: perlindungan ABK di luar negeri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam masa *Covid-19*, dan Perlindungan WNI di AS terkait respon isu rasial di masyarakat.
 - 3) Kebijakan Luar Negeri Indonesia pasca *Covid-19*.
dalam Rapat bersifat tertutup.
- d. RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas tanggal 23 Juni 2020 dalam rangka membahas:**
- 1) Wantannas:
 - a) Isu ketahanan energi
 - b) Optimalisasi Penegakan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka Ketahanan Nasional
 - 2) Lemhannas:
Kajian Permasalahan nasional saat ini dan yang akan datang
- dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Lemhannas atas beberapa kajian yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas agar terus melakukan kajian khususnya tatanan kehidupan baru di era pasca pandemi Covid-19 yang rekomendasinya menjadi rujukan kebijakan Pemerintah dalam menyiapkan kepemimpinan

nasional bagi calon pimpinan bangsa yang lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan.

- 2) Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal Wantannas atas rekomendasi kebijakan dan strategi nasional melalui diantaranya kajian terhadap energi untuk ketahanan nasional, pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian lainnya. Untuk selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal Wantannas agar terus melakukan usulan kebijakan dan strategis nasional, jati diri bangsa, efektifitas lembaga tinggi negara, dan risiko pembangunan nasional yang dihadapi bangsa dan negara untuk kurun waktu tertentu.

e. RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla tanggal 24 Juni 2020 dalam rangka membahas:

- 1) Upaya Bakamla Memperkuat Pengamanan Laut di Indonesia
- 2) Perkembangan Pembangunan Zona Maritim Bakamla dalam Rapat bersifat tertutup.

f. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN tanggal 25 Juni 2020 dalam rangka membahas:

- 1) Kesiapan BSSN dalam menghadapi Pilkada serentak
- 2) Ketersediaan *secure hosting* aplikasi milik K/L
- 3) Pengamanan penggunaan jaringan internet/online system untuk masyarakat dalam Rapat bersifat tertutup.

g. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN tanggal 25 Juni 2020 dalam rangka membahas:

- 1) Analisis dan rekomendasi BIN dalam Pilkada serentak
- 2) Analisis dan rekomendasi BIN terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
- 3) Analisis dan rekomendasi BIN terhadap terorisme dalam Rapat bersifat tertutup.

3. Panja Pengawasan

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Panja Pengawasan Komisi I DPR RI bidang penanganan Covid-19 telah mulai melaksanakan kegiatannya dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Intern Komisi I DPR RI, dengan rincian sebagai berikut:

a. Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona

- 1) Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona Komisi I DPR RI dalam mendapatkan data dan informasi telah melaksanakan Rapat dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI yang terkait, yaitu:
 - a) RDP dengan Sekjen Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Sestama BIN, Sestama BSSN, Sestama Bakamla, Sestama Lemhannas, Deputi Bidang Sistem Nasional Wantannas terkait dengan:
 - i. Langkah strategis penanganan pandemi Covid-19 untuk Ketahanan Nasional;
 - ii. Alokasi dan kebutuhan anggaran penanganan pandemi Covid-19.
 - b) RDP dengan Sestama BIN dan Sestama BSSN mengenai:
 - i. Tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 29 Juni 2020;
 - ii. Skenario dan langkah strategis dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan antisipasi kemungkinan munculnya pandemi virus corona gelombang kedua, ketiga, dan berikutnya;
 - iii. Alokasi pagu anggaran pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kebutuhan minimal anggaran TA 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19;
 - iv. RKP dan RKA TA 2021 dalam penanganan Covid-19.
 - c) RDP dengan Sekjen Kemhan R.I. dan Asrenum Panglima TNI mengenai:
 - i. Tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 29 Juni 2020;
 - ii. Laporan perkembangan kesiapan peralatan dan sarana prasarana pada 110 Rumah Sakit TNI rujukan Covid-19;
 - iii. Penjelasan mengenai penguatan fungsi Nubika pada organisasi Kemhan/TNI;
 - iv. Alokasi pagu anggaran pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kebutuhan minimal anggaran TA 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19;
 - v. RKP dan RKA TA 2021 dalam penanganan Covid-19.
- 2) Pada akhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Panja telah melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Intern Komisi I DPR RI sebagai bahan bagi Komisi I DPR RI dalam membuat rekomendasi kepada Pemerintah.

b. Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19

Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19 Komisi I DPR RI dalam mendapatkan data dan informasi telah melaksanakan Rapat dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI yang terkait, yaitu:

- 1) RDPU dengan Dirut PT. Telkomsel, Dirut. PT. Indosat Tbk., dan Dirut PT. XL Axiata, Tbk. mengenai langkah strategis Operator Telekomunikasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari sektor telekomunikasi”, dengan catatan sebagai berikut:
 - a) Panja Pengawasan Terhadap Informasi dan ICT Dalam Masa Pandemi Covid-19 Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan PT. Telkomsel, PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk, terkait dukungan dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh operator telekomunikasi dalam upaya menangani dampak pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia.
 - b) Selanjutnya, penjelasan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Panja dalam menyusun rekomendasi.
- 2) RDPU dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo mengenai langkah strategis penanganan Covid-19 dalam aspek informasi dan *ICT*, dengan catatan sebagai berikut:
 - a) Panja telah menerima penjelasan dari Dirjen IKP dan Dirjen Aptika Kemkominfo terkait langkah strategis yang telah dilakukan Kemkominfo sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, penjelasan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Panja dalam menyusun rekomendasi.
 - b) Panja meminta Dirjen Aptika Kemkominfo untuk melakukan evaluasi terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan menyerahkan dokumen evaluasi kepada Komisi I DPR RI.

c. Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19

Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 Komisi I DPR RI dalam mendapatkan data dan informasi telah melaksanakan Rapat dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI yang terkait, yaitu:

- 1) RDP dengan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Dirjen Protkons) Kemlu R.I., Pejabat Markas Besar TNI Angkatan Darat (MABESAD) dan Pejabat Markas Besar TNI Angkatan Laut (MABESAL) mengenai:

- a) Penjelasan Dirjen Protkons Kemlu R.I. mengenai:
 - i. Langkah diplomasi strategis perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri di masa pandemi Covid-19;
 - ii. Kebijakan strategis di bidang perlindungan WNI dan BHI di luar negeri di masa pandemi Covid-19;
 - iii. Pelaporan di bidang pemantauan, perlindungan, evakuasi WNI dan BHI di luar negeri;
 - iv. Alokasi dan kebutuhan anggaran penanganan pandemi Covid-19 terutama bagi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.
- b) Penjelasan Pejabat MABESAD dan MABESAL mengenai:
 - i. Peran dan langkah TNI di perbatasan dalam perlindungan WNI dan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - ii. Langkah strategis penanganan pandemi Covid-19 di wilayah perbatasan.

dengan catatan sebagai berikut:

- a) Panja telah mendengarkan paparan Kemlu terkait dengan langkah strategis perlindungan WNI di Luar Negeri dalam Pandemi Global COVID-19, dan paparan Mabes TNI-AD serta Mabes TNI-AL terkait langkah strategis perlindungan WNI dan pencegah penyebaran COVID-19 di wilayah perbatasan.
- b) Panja meminta laporan tertulis dari Kemlu :
 - i. Perkembangan informasi, data, dan kebijakan perlindungan dan penanganan WNI di Luar Negeri di masa pandemi COVID-19
 - ii. Alokasi anggaran yang tersedia pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kebutuhan alokasi minimal pada tahun 2020 untuk perlindungan WNI di luar negeri di masa pandemi COVID-19.
 - iii. Alokasi anggaran pada Pagu Indikatif RKA RAPBN TA 2021 serta kebutuhan alokasi anggaran minimal pada RKA RAPBN TA 2021 untuk perlindungan WNI di luar negeri di masa pandemi COVID-19.
- c) Panja meminta laporan tertulis dari Mabes TNI-AD dan Mabes TNI-AL :
 - i. Perkembangan informasi, data, dan kebijakan perlindungan dan penanganan WNI di perbatasan di masa pandemi COVID-19.
 - ii. Alokasi anggaran yang tersedia pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kebutuhan alokasi minimal pada tahun 2020 untuk perlindungan WNI di masa pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan.
 - iii. Alokasi anggaran pada Pagu Indikatif RKA RAPBN TA 2021 serta kebutuhan alokasi anggaran minimal pada RKA RAPBN TA 2021 untuk perlindungan WNI di masa pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan.

- 2) RDP dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengenai:
- a) Penjelasan Dirjen Imigrasi Kemkumham R.I., mengenai ;
 - i. Penerapan protocol kesehatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di masa pandemi Covid-19;
 - ii. Kebijakan dan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing (POA) di masa pandemi Covid-19.
 - b) Penjelasan Kepala BP2MI, mengenai :
 - i. Kebijakan Nasional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di masa pandemi Covid-19;
 - ii. Langkah strategis BP2MI dalam Pelindungan PMI yang rentan dan terdampak pandemi Covid-19;
 - iii. Dukungan BP2MI dalam proses repatriasi PMI akibat dampak Covid-19

dengan catatan sebagai berikut:

- a) Panja telah mendengarkan paparan Dirjen Imigrasi Kemkumham terkait penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di masa pandemi COVID-19; dan kebijakan dan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing (POA) di masa pandemi COVID-19; serta BP2MI terkait kebijakan nasional pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di masa pandemi COVID-19; langkah strategis BP2MI dalam pelindungan PMI yang rentan dan terdampak Pandemi COVID-19; dan dukungan BP2MI dalam proses repatriasi PMI akibat dampak COVID-19
- b) Panja meminta laporan perkembangan sampai dengan akhir Juli 2020 secara tertulis dari Dirjen Imigrasi Kemkumham mengenai:
 - i. Efektivitas implementasi kebijakan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing (POA) baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan dalam masa pandemi COVID-19.
 - ii. Efektivitas implementasi kebijakan protokol kesehatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di masa pandemi COVID-19.
- c) Panja meminta laporan perkembangan sampai dengan akhir Juli 2020 secara tertulis dari Kepala BP2MI, mengenai data dan fakta kepulangan selama masa pandemi COVID-19, berdasarkan:
 - i. SISKOTKLN terintegrasi SIMKIM dan sistem kepulangan online;
 - ii. Negara penempatan; dan
 - iii. Provinsi asal.

4. Kunker Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, yaitu pada tanggal 17-19 Juli 2020, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke Provinsi:

- a. Banten (Serang)
- b. Jawa Barat (Bandung)

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 – 2020.

Jakarta, 16 Juli 2020
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001